



BUPATI SUMENEP

SAMBUTAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

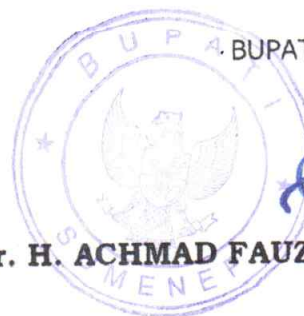
Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada tanggal 13 Desember 2024 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan, sehingga pada saat ini Pemerintah Kabupaten Sumenep telah memiliki pedoman / dasar dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Sumenep mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 melalui surat kabar serta website <http://www.sumenepkad.go.id> dan <http://bkad.sumenepkab.go.id>

Besar harapan kami semoga dengan publikasi ini dapat menjadi sarana informasi bagi berbagai pihak dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran aktif serta partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Sumenep.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sumenep, Januari 2025



BUPATI SUMENEP

Dr. H. ACHMAD FAUZI WONGSOJUDO, SH, MH.

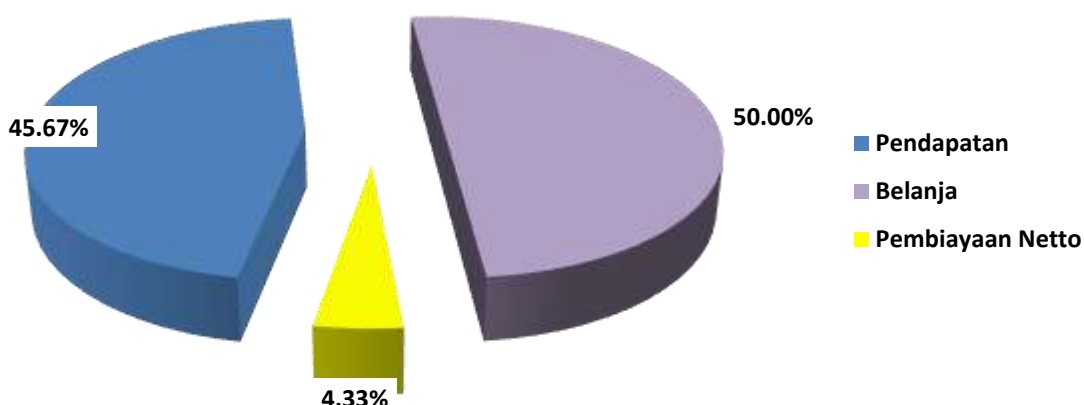
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMENEP TAHUN ANGGARAN 2025

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

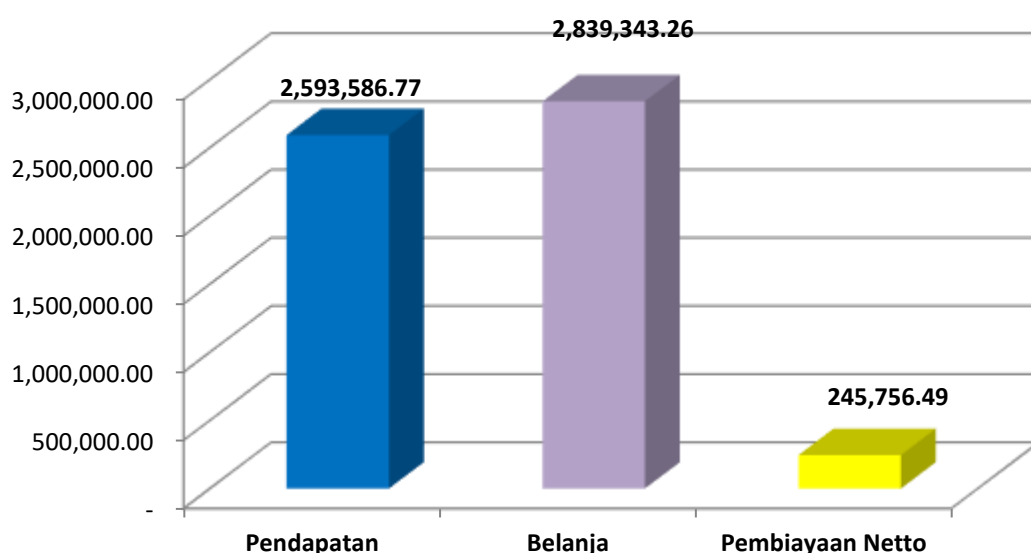
Sebagai Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, maka dalam APBD Tahun Anggaran 2025 tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2024 dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 60 Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024, dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :

**Gambar 1.a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025**



**Gambar 1.b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Dalam jutaan Rupiah)**

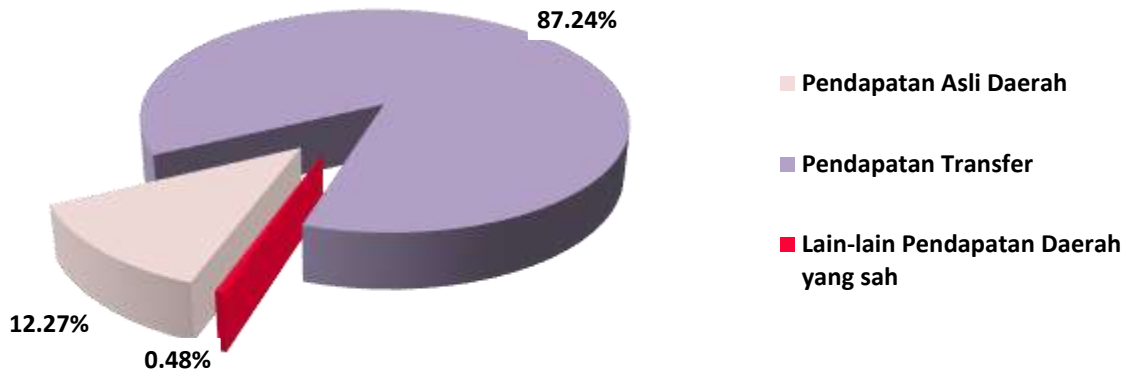


I. PENDAPATAN

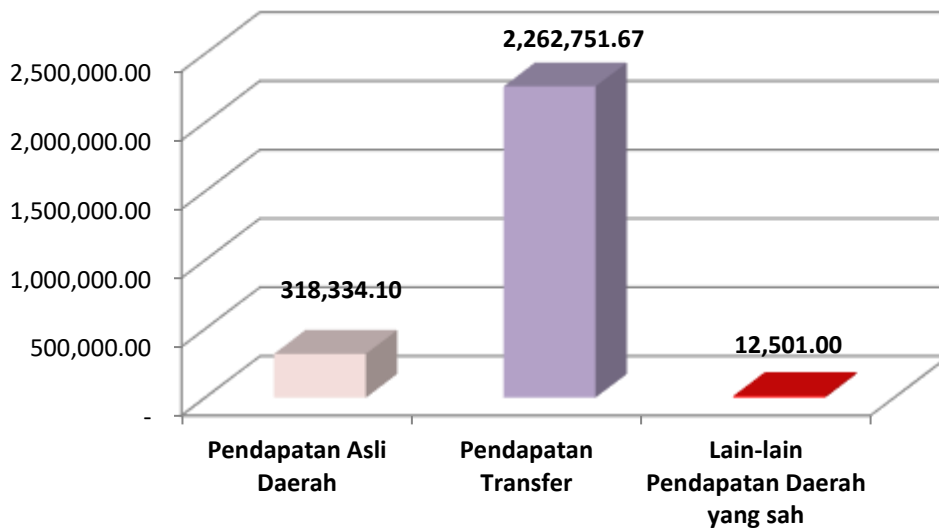
APBD Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 menargetkan Pendapatan sebesar Rp.2.593.586.768.158 yang direncanakan diperoleh dari :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 318.334.097.017
b. Pendapatan Transfer	Rp. 2.262.751.671.141
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Rp. 12.501.000.000
Total Pendapatan	Rp. 2.593.586.768.158

Gambar 2.a. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025



Gambar 2.b. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 Dan Awal (Dalam jutaan Rupiah)

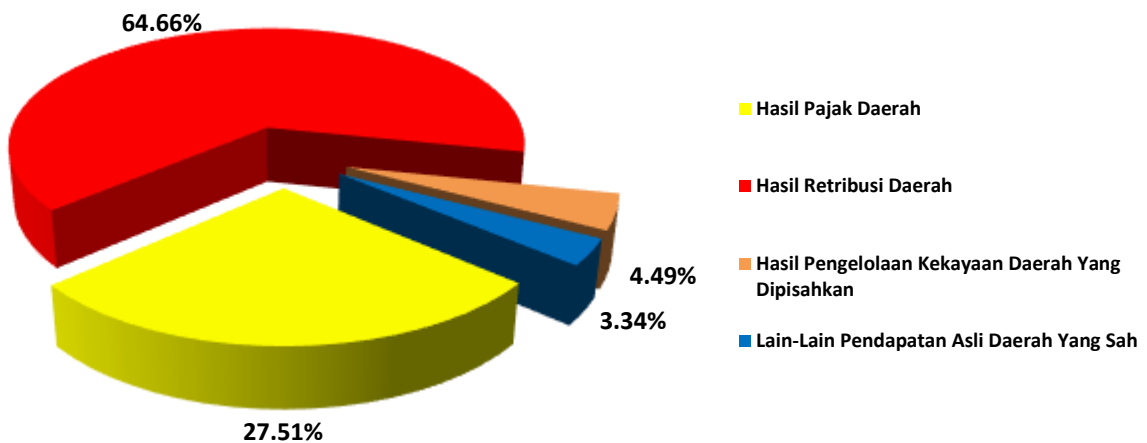


A. PENDAPATAN ASLI DAERAH

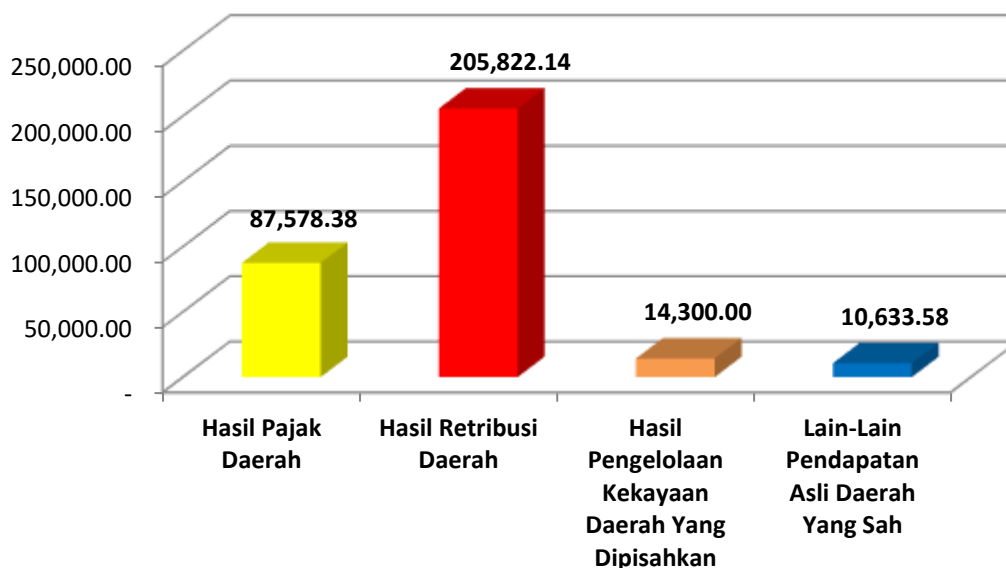
Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 318.334.097.017. terdiri dari :

1. Pajak Daerah	Rp.	87.578.384.181
2. Retribusi Daerah	Rp.	205.822.135.236
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Rp.	14.300.000.000
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	Rp.	<u>10.633.577.600</u>
Total Pendapatan Asli Daerah	Rp.	318.334.097.017

Gambar 3.a. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025



**Gambar 3.b. Anggaran Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025
(Dalam jutaan Rupiah)**

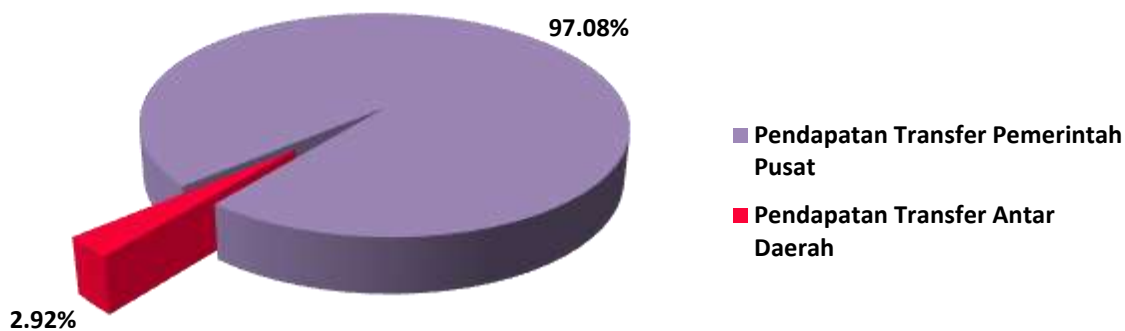


B. PENDAPATAN TRANSFER

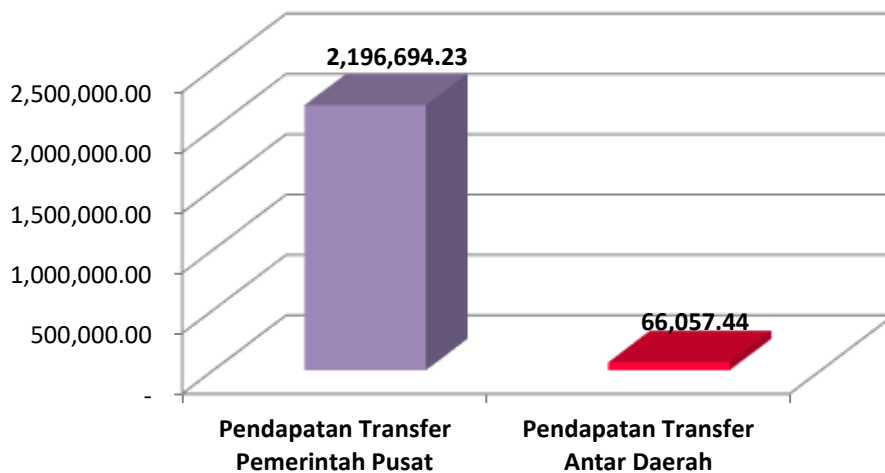
Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 2.262.751.671.141 terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Rp.	2.196.694.233.352
2. Pendapatan Transfer Antar Daerah	Rp.	66.057.437.789
Total Pendapatan Transfer	Rp.	2.262.751.671.141

Gambar 4.a. Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025



**Gambar 4.b. Anggaran Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025
(Dalam jutaan Rupiah)**

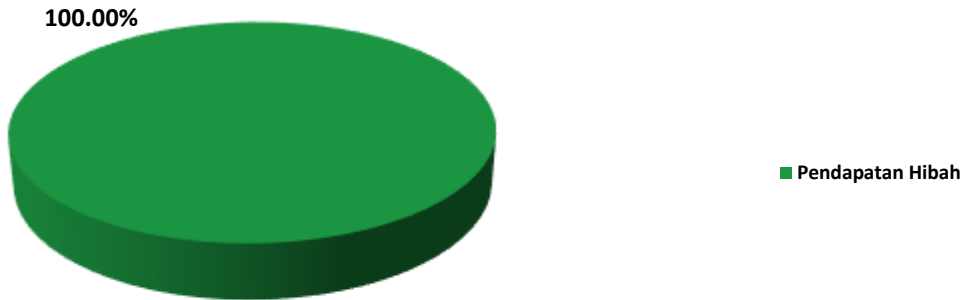


C. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

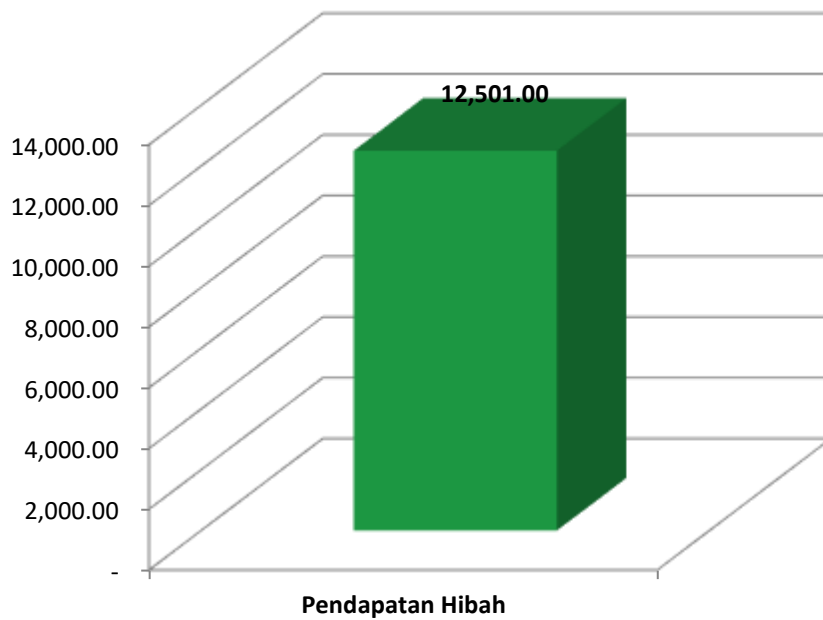
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 12.501.000.000 terdiri dari:

1. Pendapatan Hibah	Rp. 12.501.000.000
Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	Rp. 12.501.000.000

Gambar 5.a. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2024



Gambar 5.b. Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2025 (Dalam jutaan Rupiah)

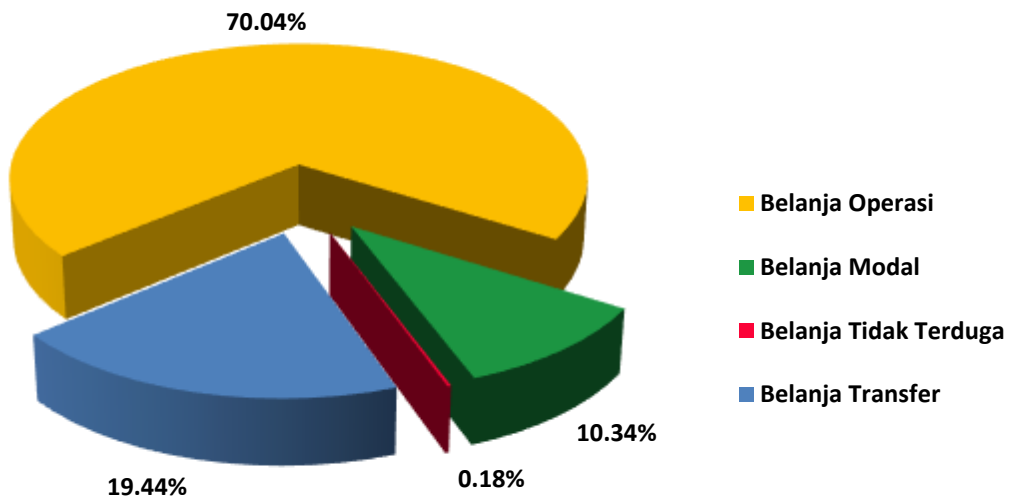


II. BELANJA

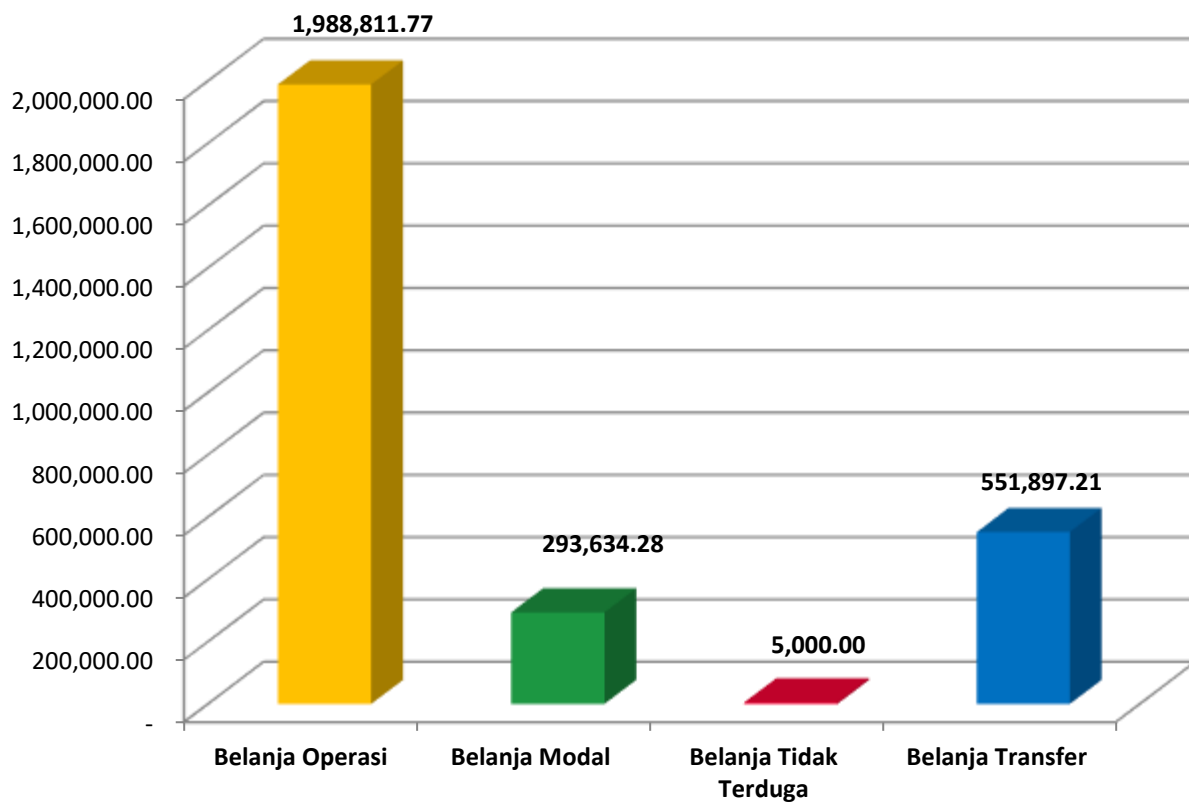
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 menargetkan Belanja sebesar Rp. 2.839.343.257.870 yang direncanakan untuk membiayai :

a. Belanja Operasi	Rp. 1.988.811.765.986
b. Belanja Modal	Rp. 293.634.277.454
c. Belanja Tidak Terduga	Rp. 5.000.000.000
d. Belanja Transfer	Rp. 551,897,214,430
Total Belanja	Rp. 2.839.343.257.870

Gambar 6.a. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025



Gambar 6.b. Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Dalam jutaan Rupiah)

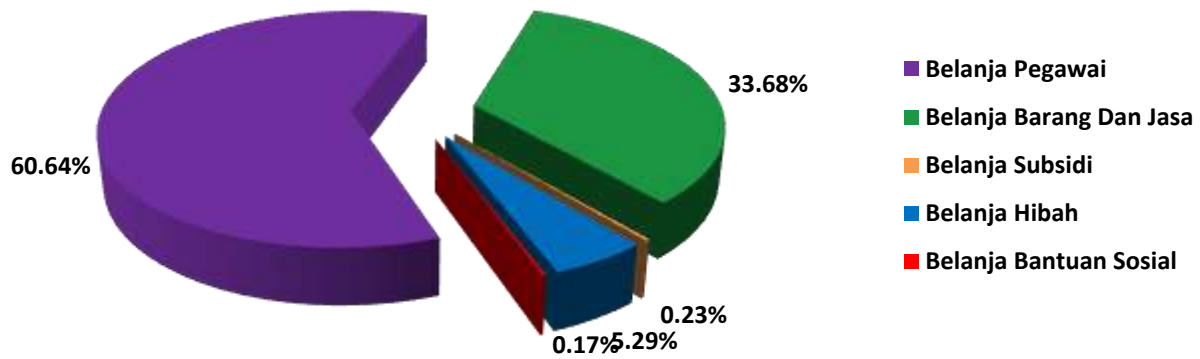


A. BELANJA OPERASI

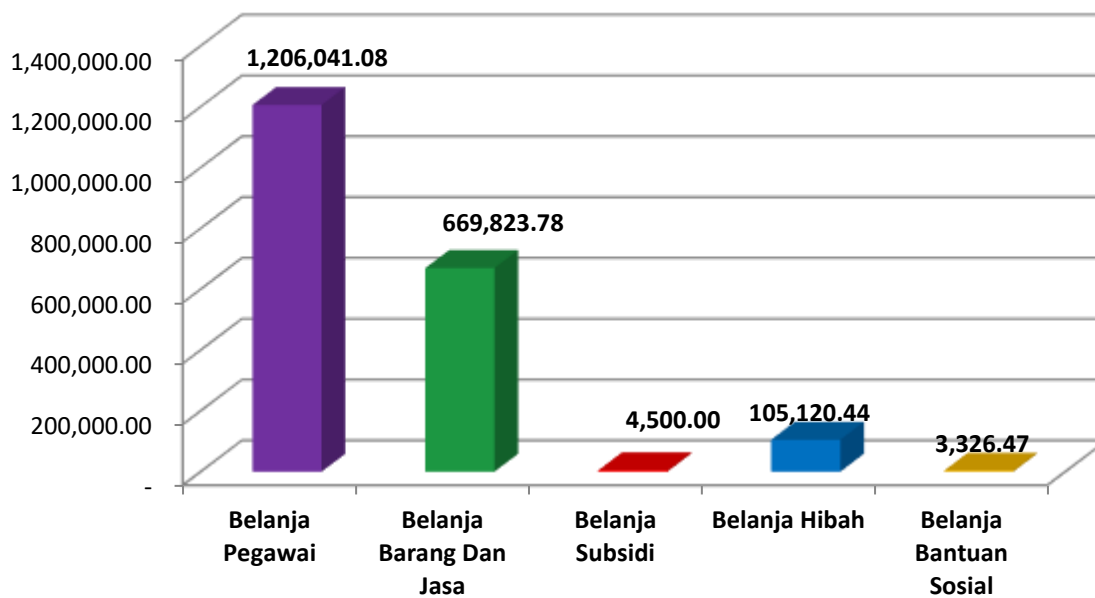
Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 1.988.811.765.986 terdiri dari :

1. Belanja Pegawai	Rp. 1.206.041.075.337
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp. 669.823.776.082
3. Belanja Subsidi	Rp. 4.500.000.000
4. Belanja Bantuan Hibah	Rp. 105.120.442.567
5. Belanja Bantuan Sosial	Rp. 3.326.472.000
Total Belanja Operasi	Rp. 1.988.811.765.986

Gambar 7.a. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025



Gambar 7.b. Anggaran Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 (Dalam jutaan Rupiah)

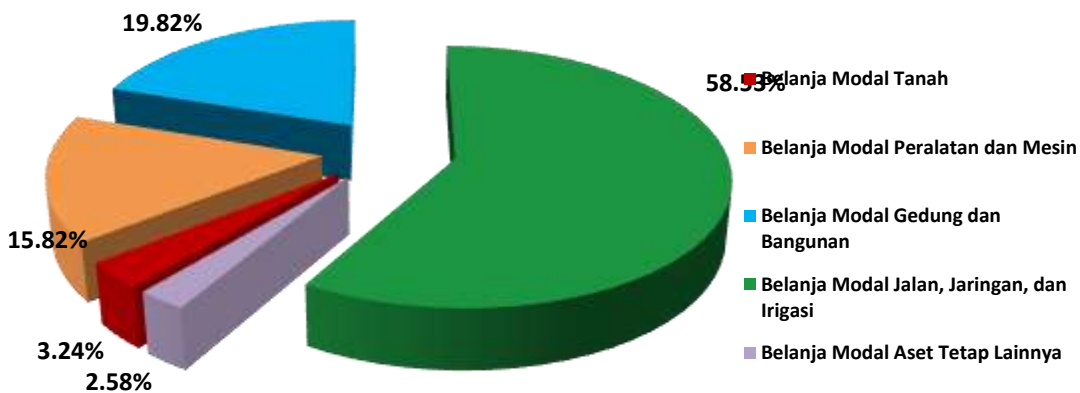


B. BELANJA MODAL

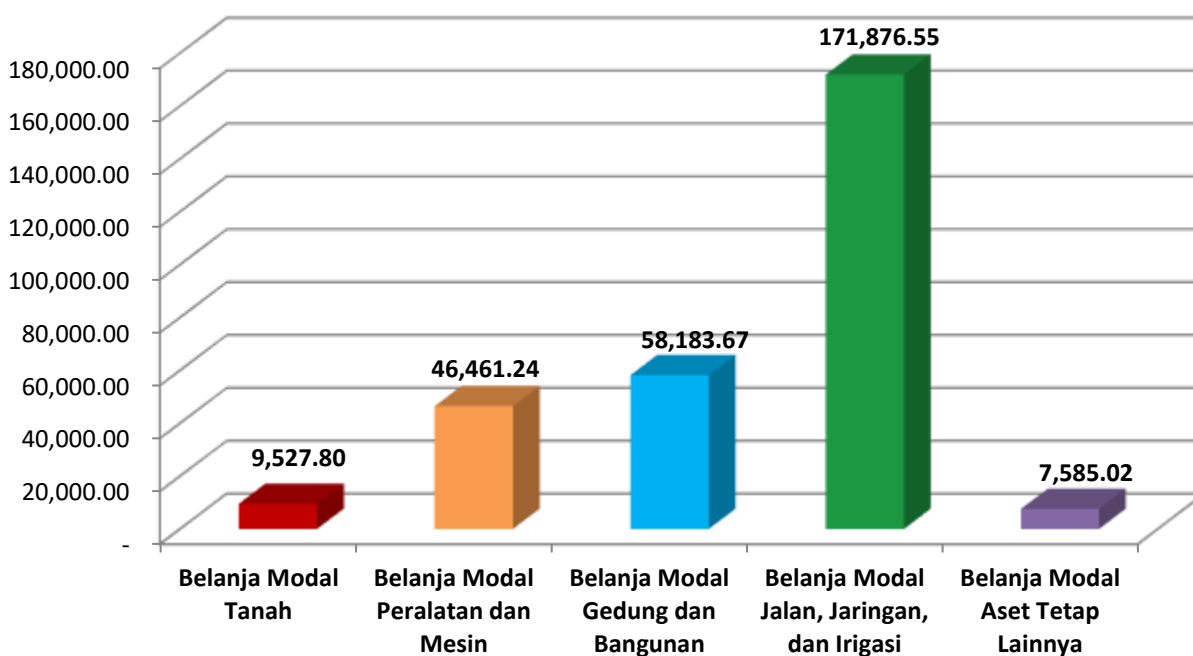
Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp. 293.634.277.454 terdiri dari :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Belanja Modal Tanah | Rp. 9.527.800.000 |
| 2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. 46.461.235.764 |
| 3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. 58.183.667.649 |
| 4. Belanja Modal Jalan. Jaringan. dan Irigasi | Rp.171.876.554.341 |
| 5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. 7.585.019.700 |
| Total Belanja Modal | Rp.293.634.277.454 |

Gambar 8.a. Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025



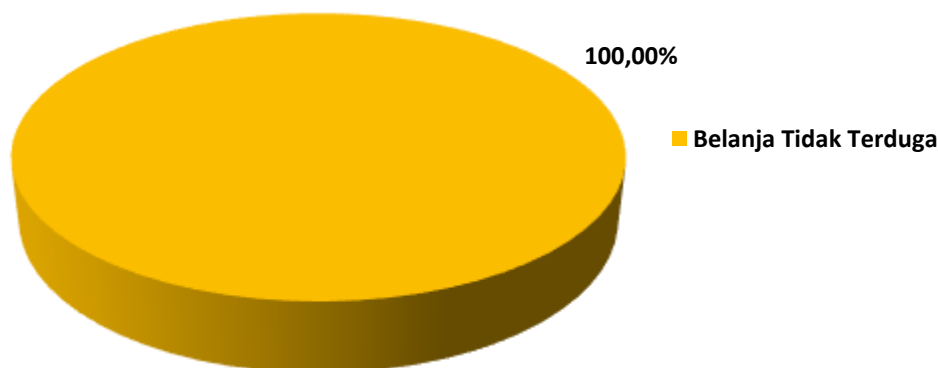
Gambar 8.b. Anggaran Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 (Dalam jutaan Rupiah)



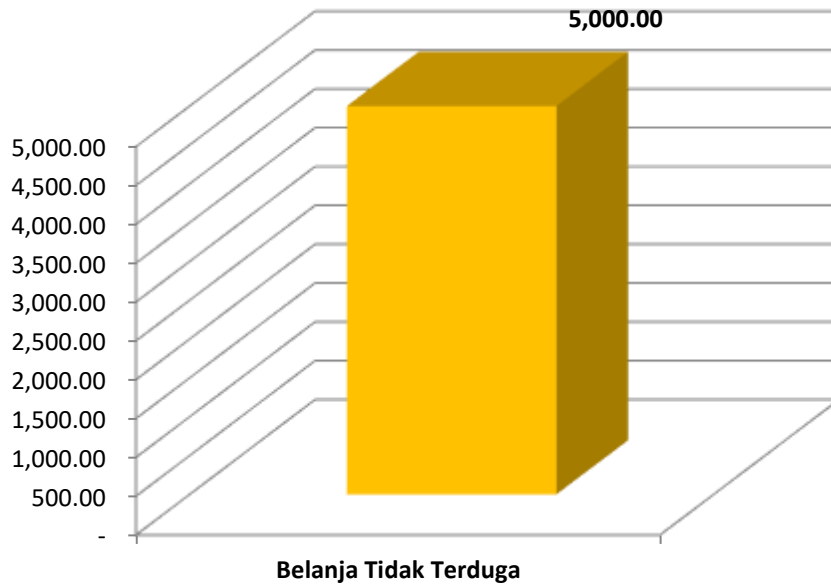
C. BELANJA TIDAK TERDUGA

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp.5.000.000.000.-

Gambar 9.a. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025



**Gambar 9.b. Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025
(Dalam jutaan Rupiah)**

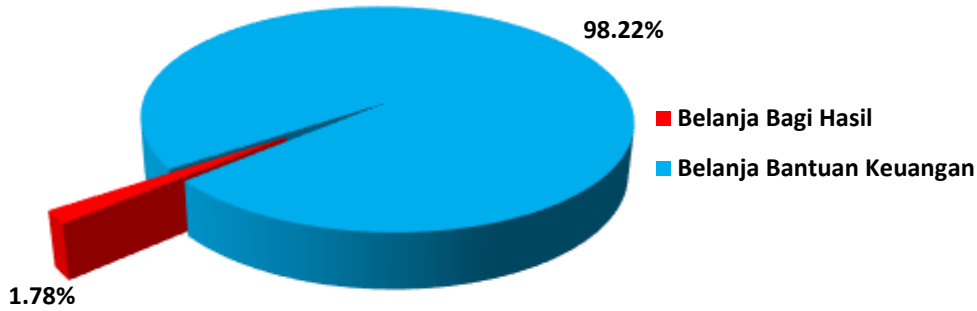


D. BELANJA TRANSFER

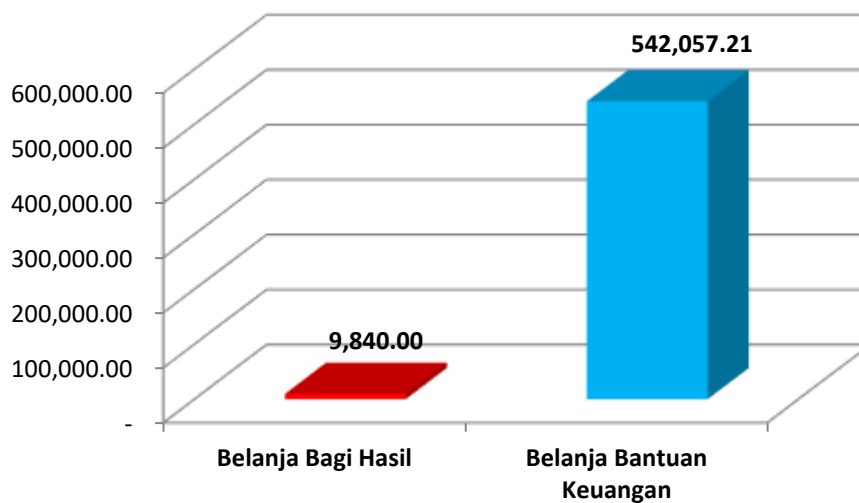
Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.551.897.214.430 terdiri dari :

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Belanja Bagi Hasil | Rp. 9.840.000.000 |
| 2. Belanja Bantuan Keuangan | <u>Rp. 542.057.214.430</u> |
| Total Belanja Transfer | Rp. 551.897.214.430 |

Gambar 10.a. Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025



**Gambar 10.b. Anggaran Belanja Transfer Tahun Anggaran 2025
(Dalam jutaan Rupiah)**

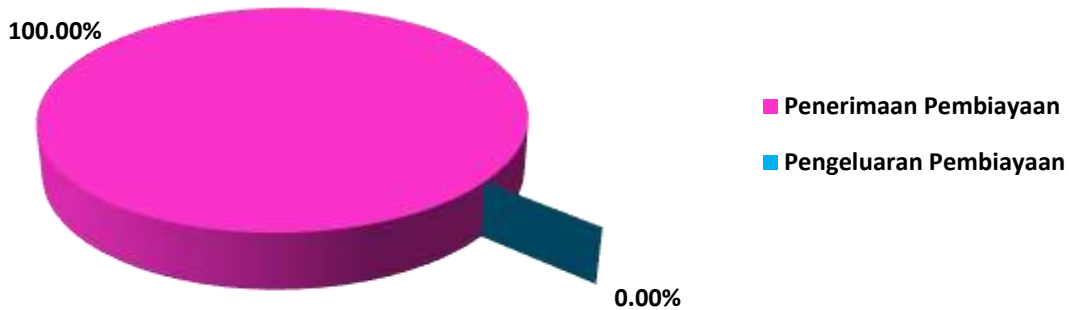


III. PEMBIAYAAN

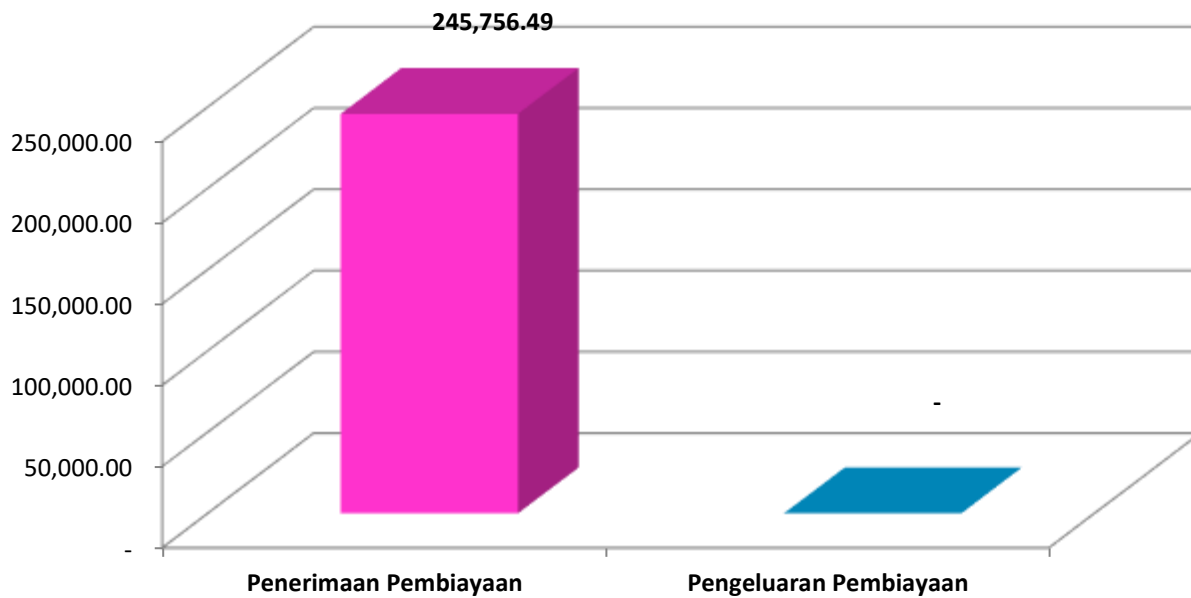
Dari seluruh perhitungan antara Pendapatan dan Belanja diperoleh *Defisit* sebesar Rp. 245.756.489.712 Defisit tersebut ditutupi dari Pembiayaan Netto dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 245.756.489.712
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Rp. 0
Pembiayaan Netto	Rp. 245.756.489.712

Gambar 11.a. Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025



Gambar 11.b. Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 (Dalam jutaan Rupiah)

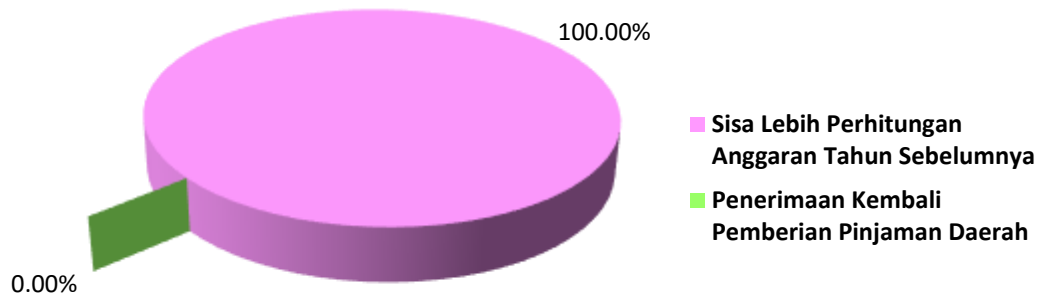


a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

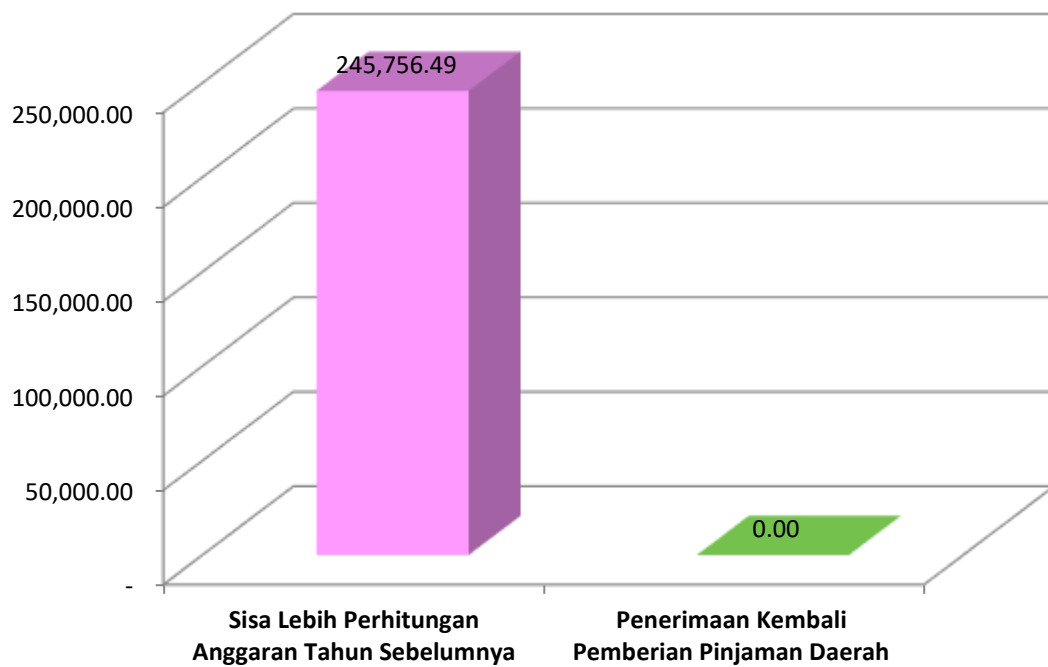
Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 245.756.489.712 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Rp. 245.756.488.712
b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	Rp. 1.000
	Rp. 245.756.489.712

Gambar 13.a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025



Gambar 11.b. Anggaran Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 (Dalam jutaan Rupiah)



b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 0,-

**RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI
TAHUN ANGGARAN 2025**

Belanja Daerah Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 dikelompokkan berdasarkan urusan-urusan dan dalam Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga serta Belanja Transfer dan dirinci dalam program-program prioritas pada masing-masing OPD sebagai berikut :

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 802.389.318.525,83** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan;
3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan;

1.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 555.714.572.318,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

1.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 249.491.588.294,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase;
6. Program Penataan Bangunan Gedung;
7. Program Penyelenggaraan Jalan;
8. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
9. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

1.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 7.222.796.011,06** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman melalui :

1. Program Pengembangan Perumahan;
2. Program Kawasan Permukiman;
3. Program Peningkatan Prasarana. Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).

1.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 19.631.605.351,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
3. Program Penanggulangan Bencana;
4. Program Pencegahan. Penanggulangan. Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran.

1.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 21.352.208.597,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Sosial melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana;

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 15.701.150.941,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
3. Program Penempatan Tenaga Kerja.

2.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 845.348.968,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak melalui :

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan;
2. Program Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
4. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
5. Program Perlindungan Khusus Anak.

2.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 1.860.994.520,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pangan melalui :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan Keamanan Pangan.

2.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 8.866.286.000,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan melalui :

1. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
2. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
3. Program Pengelolaan Tanah Kosong;

2.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 19.901.031.223,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
4. Program Peningkatan Pendidikan. Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;

2.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 10.162.357.459,56** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;

2.7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 14.898.571.619,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penataan Desa;
3. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan. Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.

2.8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 12.525.733.044,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana melalui :

1. Program Pengendalian Penduduk
2. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
3. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

2.9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 58.869.892.422,73** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ);
3. Program Pengelolaan Pelayaran;
4. Program Pengelolaan Penerbangan.

2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 18.694.859.285,68** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 12.304.986.178,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi;
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian;
5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi;
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM);
7. Program Pengembangan UMKM.

2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar **Rp. 6.276.344.331,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Promosi Penanaman Modal;
3. Program Pelayanan Penanaman Modal;

2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Anggaran belanja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 6.329.243.329,90** dengan Program Prioritas Urusan Kepemudaan dan Olah Raga melalui :

1. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
3. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Statistik Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 99.862.400,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Statistik melalui :

1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Persandian Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 199.783.200,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Persandian melalui :

1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 9.751.170.368,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Kebudayaan;
3. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
4. Program Pembinaan Sejarah;
5. Program Pengelolaan Permuseuman.

2.17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 5.578.722.420,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pembinaan Perpustakaan;
3. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.

2.18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 157.145.000,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan melalui :

1. Program Pengelolaan Arsip;

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 8.288.103.291,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

3.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 4.663.018.522,96** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata melalui :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
2. Program Pemasaran Pariwisata
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.

3.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 66.434.627.681,83** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian melalui :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian;
3. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
5. Program Perizinan Usaha Pertanian;
6. Program Penyuluhan Pertanian.

3.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 2.119.999.471,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan melalui :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
3. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen;
4. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.

3.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Anggaran belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 3.539.134.865,00** dengan Program Prioritas Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian melalui:

1. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.1. SEKRETARIAT DAERAH

Anggaran belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 55.986.821.779,00** dengan Program Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
3. Program Perekonomian Dan Pembangunan.

4.2. SEKRETARIAT DPRD

Anggaran Belanja Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD sebesar **Rp. 72.750.156.660,93** dengan Program Prioritas Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.1. PERENCANAAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 11.456.743.299,57** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Perencanaan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
3. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

5.2. KEUANGAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 629.228.713.604,01** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Keuangan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

5.3. KEPEGAWAIAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 12.671.328.603,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Kepegawaian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Kepegawaian Daerah.

5.4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 716.996.900,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Pendidikan dan Pelatihan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5.5. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Anggaran belanja Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 4.398.806.344,00** dengan Program Prioritas Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.1. INSPEKTORAT DAERAH

Anggaran belanja Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 17.897.157.341,00** dengan Program Prioritas Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Inspektorat Daerah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
3. Program Perumusan Kebijakan. Pendampingan Dan Asistensi.

7. UNSUR KEWILAYAHAN

7.1. KECAMATAN

Anggaran belanja Unsur Kewilayahan Kecamatan Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 79.554.585.594,94** dengan Program Prioritas Unsur Kewilayahan Kecamatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

8. PEMERINTAHAN UMUM

8.1. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Anggaran belanja Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar **Rp. 10.811.492.105,00** dengan Program Prioritas Unsur Pemerintahan Umum Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan;
3. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;

4. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi. Sosial. Dan Budaya;
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial.

Sehingga nampak dalam ringkasan Belanja Kabupaten Sumenep menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	249.656.593.708,72	1.406.145.495.388,17			1.655.802.089.096,89
1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	15.199.660.837,00	787.189.657.688,83			802.389.318.525,83
1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	51.666.803.184,00	504.047.769.134,00			555.714.572.318,00
1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	182.479.712.271,72	67.011.876.022,28			249.491.588.294,00
1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		7.222.796.011,06			7.222.796.011,06
1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	236.450.235,00	19.395.155.116,00			19.631.605.351,00
1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	73.967.181,00	21.278.241.416,00			21.352.208.597,00
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	27.040.572.078,90	175.982.910.630,97			203.023.482.709,87
2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	146.447.179,00	15.554.703.762,00			15.701.150.941,00
2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.328.600,00	843.020.368,00			845.348.968,00
2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan		1.860.994.520,00			1.860.994.520,00
2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	7.702.625.000,00	1.163.661.000,00			8.866.286.000,00
2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	309.411.858,00	19.591.619.365,00			19.901.031.223,00
2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	398.132.358,00	9.764.225.101,56			10.162.357.459,56
2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		14.898.571.619,00			14.898.571.619,00
2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	154.421.652,00	12.371.311.392,00			12.525.733.044,00
2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	17.074.562.899,00	41.795.329.523,73			58.869.892.422,73
2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	425.991.600,00	18.268.867.685,68			18.694.859.285,68
2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah	51.614.702,00	12.253.371.476,00			12.304.986.178,00
2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	4.815.014,00	6.271.529.317,00			6.276.344.331,00
2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	199.961.329,90	6.129.282.000,00			6.329.243.329,90
2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		99.862.400,00			99.862.400,00
2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		199.783.200,00			199.783.200,00
2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	470.216.587,00	9.280.953.781,00			9.751.170.368,00
2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	100.043.300,00	5.478.679.120,00			5.578.722.420,00
2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan		157.145.000,00			157.145.000,00
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.754.591.120,96	81.290.292.710,83			85.044.883.831,79
3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	42.656.634,00	8.245.446.657,00			8.288.103.291,00
3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	461.733.622,96	4.201.284.900,00			4.663.018.522,96
3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	330.967.600,00	66.103.660.081,83			66.434.627.681,83
3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	1.299.999.999,00	819.999.472,00			2.119.999.471,00
3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	1.619.233.265,00	1.919.901.600,00			3.539.134.865,00

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	BELANJA MODAL	BELANJA OPERASI	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER	JUMLAH BELANJA
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	7.522.082.212,43	121.214.896.227,50			128.736.978.439,93
4.01 Sekretariat Daerah	3.778.131.150,00	52.208.690.629,00			55.986.821.779,00
4.02 Sekretariat DPRD	3.743.951.062,43	69.006.205.598,50			72.750.156.660,93
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	2.939.450.855,56	98.635.923.465,02	5.000.000.000,00	551.897.214.430,00	658.472.588.750,58
5.01 Perencanaan	967.919.949,56	10.488.823.350,01			11.456.743.299,57
5.02 Keuangan	1.467.194.922,00	70.864.304.252,01	5.000.000.000,00	551.897.214.430,00	629.228.713.604,01
5.03 Kepegawaian	407.232.185,00	12.264.096.418,00			12.671.328.603,00
5.04 Pendidikan Dan Pelatihan		716.996.900,00			716.996.900,00
5.05 Penelitian Dan Pengembangan	97.103.799,00	4.301.702.545,00			4.398.806.344,00
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	247.372.269,00	17.649.785.072,00			17.897.157.341,00
6.01 Inspektorat Daerah	247.372.269,00	17.649.785.072,00			17.897.157.341,00
7 UNSUR KEWILAYAHAN	2.473.615.208,74	77.080.970.386,20			79.554.585.594,94
7.01 Kecamatan	2.473.615.208,74	77.080.970.386,20			79.554.585.594,94
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		10.811.492.105,00			10.811.492.105,00
8.01 Kesatuan Bangsa Dan Politik		10.811.492.105,00			10.811.492.105,00
JUMLAH TOTAL	293.634.277.454,31	1.988.811.765.985,69	5.000.000.000,00	551.897.214.430,00	2.839.343.257.870,00